



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2024

**DINAS NAKERTRANS
PROVINSI JAMBI**

**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAMBI**

Jalan. Fattimura, Komplek Transito, Kecamatan Alama Barajo
Telp.(0741) 3072787,Fax (0741) 3072787Website:
WWW.nakertrans_jambiprov.go.id

2025



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-NYA Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Tahun 2024 ini, dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan penerapan Tata Kepemerintahan yang baik sebagai implementasi Permen RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Laporan Kinerja dan Instruksi Gubernur Jambi No 1 Tahun 2000 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap satuan kerja perangkat daerah, sebagai penyelenggara pemerintahan dalam mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

Laporan Kinerja merupakan suatu pertanggung jawaban tertulis yang tepat, jelas dan nyata dari suatu Instansi Pemerintah kepada pemberi wewenang. Laporan Kinerja tersebut meliputi hasil dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat diketahui tingkat capaian hasil kinerja instansi terkait berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis lima tahunan. Berdasarkan dari penjabaran visi dan misi yang akan diuraikan didalam penyusunan Laporan Kinerja.

Kami menyadari terhadap upaya -upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi selama tahun 2024 ini masih dirasakan belum memberikan kepuasan yang maksimal, namun demikian harus diakui pula bahwa upaya-upaya tersebut masih memberikan dampak positif terhadap pencapaian visi dan misi SKPD dan **JAMBI MANTAP 2024**.

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kami membuka luas kepada semua pihak yang berkeinginan untuk memberikan masukan dan saran ke arah perbaikan, dimasa mendatang dan semoga dapat memberikan manfaat.

Jambi, Januari 2024

Plt. Kepala Dinas,

MUHAMMAD HARIR KHODARI, SP
NIP.19710424 1998031 006



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Pembentukan Organisasi.....	1
1.2 Tugas Pokok, Fungsi	2
1.3. Aspek Strategis Organisasi.....	9
1.4. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	9
1.5. Struktur Organisasi	11
1.6. Sumber Daya Manusia	12
BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	19
2.1. Perencanaan Strategis.....	19
1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.....	19
2. Indikator Kinerja	21
3. Strategi dan Arah Kebijakan	26
4. Program dan Kegiatan	31
2.2 Perjanjian Kinerja	33
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	36
3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	36
3.1.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	38
3.1.3 Capaian IKU Tahun 2023 dengan tahun 2023 dan tahun 2021.	45
3.1.4 Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra 2021-2026.....	48
3.1.5 Analisis atas Efisiensi terhadap Penggunaan Sumber Daya	52
3.1.6 Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan	54
3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	57
3.2.1 Program dan Kegiatan	57
3.2.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	58
BAB IV. PENUTUP	64



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) adalah Laporan yang berisi tentang informasi dan data yang telah diolah serta memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi/Lembaga.

Dalam upaya meningkatkan terwujudnya pembangunan yang berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna, maka fokus yang menjadi perhatian utama adalah dengan menitik beratkan sasaran dan tujuan pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Dengan demikian dalam menetapkan arah dan kebijakan pembangunan tersebut harus mempertimbangkan aspek logis, realistis, efektif dan efisien, akuntabel dan transparan, serta dilakukan dengan mengikuti norma, standar, prosedur dan kriteria, sehingga sinergitas program pembangunan yang akan dijalankan dapat terjamin keberlangsungannya Secara berkesinambungan.

Berangkat dari pemikiran diatas, maka dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pembangunan yang lebih baik, diperlukan penguatan terhadap dokumen perencanaan strategis yang lebih berkualitas, terukur dan dapat beradaptasi dengan lingkungan internal maupun eksternal, serta dapat diimplementasikan dengan mudah, cepat dan tepat pada sasarannya.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan antara lain:

- a. Perbaiki iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran.
- b. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi selama tahun 2024 melalui dana APBD Provinsi Jambi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi selama tahun 2024 melalui dana Murni APBD Provinsi Jambi mendapatkan anggaran untuk melaksanakan urusan bidang ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebesar 28.386.130.221,-, dan setelah dilakukan Perubahan APBD 2024 menjadi Rp. 26.563.912.668,- dengan realisasi Rp. 25.321.536.024,- (95,32%) keuangan dan dengan realisasi fisik 97,21%, untuk mendanai 9 program

Pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 ini permasalahan secara prinsip tidak ada, Namun demikian secara umum pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2024 telah dapat dicapai dengan baik dan telah memberikan kontribusi yang nyata terhadap pencapaian visi dan misi untuk peningkatan dan perbaikan terhadap kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi khususnya dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi pada umumnya.



Laporan Kinerja (LKj) 2024



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Jambi Nomor Tahun 2016, dan Peraturan Gubernur Jambi, Nomor 56 TAHUN 2016, tentang Kedudukan dan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Mempunyai tugas pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor Tahun 2016 adalah : ***Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan Di Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi***

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, maka Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi menyelenggarakan urusan di bidang Pembinaan, Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas, Bidang Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah dalam Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, maka Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis, administrasi, dan operasional pelaksanaan pelayanan dan Pembinaan, Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja serta Transmigrasi;
2. penyelenggaraan pelayanan teknis operasional di Bidang Pembinaan, Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja serta Transmigrasi;



3. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dukungan administrasi, dan kerjasama kepada seluruh unsur satuan organisasi di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
4. pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di Kabupaten/Kota;
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; dan
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Secara rinci tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi yang secara operasional dilaksanakan oleh Bidang dan Seksi dapat diuraikan sebagai berikut :

I. SEKRETARIAT

Tugas

Mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang dan pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, pengelolaan urusan umum, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan penataan asset dinas.

Fungsi

- a. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, asset, kerumahtanggaan, kearsipan, dan dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;



- e. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
- f. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan ketatausahaan, keuangan, asset dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- g. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi pengelolaan keuangan;
- h. pelaksanaan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- j. perumusan kebijakan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- k. pelaksanaan koordinasi antar Bidang dan kerja sama dengan SKPD terkait dalam pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- l. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas;
- m. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

II. BIDANG PEMBINAAN, PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS

Tugas

Melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi pelatihan, penempatan dan produktivitas tenaga kerja.

Fungsi

- a. merumuskan kebijakan teknis program kerja Bidang Pembinaan Pelatihan, Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b. merumuskan kebijakan teknis penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pembinaan pelatihan, penempatan tenaga kerja dan produktivitas;
- c. merumuskan kebijakan teknis pengembangan pasar kerja;



- d. merumuskan kebijakan teknis perluasan kesempatan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis penempatan tenaga kerja;
- f. merumuskan kebijakan teknis koordinasi penempatan tenaga kerja;
- g. merumuskan kebijakan teknis pembinaan pelatihan dan pemagangan;
- h. merumuskan kebijakan teknis standardisasi sertifikasi dan kompetensi;
- i. merumuskan kebijakan teknis pembinaan produktivitas;
- j. merumuskan kebijakan teknis pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- k. merumuskan kebijakan teknis koordinasi penyelenggaraan pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- l. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pembinaan Pelatihan, Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- n. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

III. BIDANG PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Tugas

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial.

Fungsi

- a. Koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan, dan anak;
- b. Koordinasi penyiapan bahan pelayanan di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
- c. Koordinasi penyiapan bahan evaluasi di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;



- d. Koordinasi penyiapan bahan pelaporan di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
- e. Verifikasi pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) daerah provinsi;
- f. Koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
- g. Koordinasi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan, pelaksanaan mogok kerja, dan penutupan perusahaan;
- h. Koordinasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan;
- i. Koordinasi pemberian fasilitasi dan/atau mediasi terhadap potensi perselisihan di perusahaan, mogok kerja, dan penutupan perusahaan;
- j. Koordinasi pembinaan, penyuluhan, bimbingan, dan monitoring hubungan industrial;
- k. Koordinasi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK);
- l. Menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya

IV. BIDANG TRANSMIGRASI

Tugas

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Ketransmigrasian.

Fungsi

- a. Merumuskan kebijakan teknis penyusunan program bidang ketransmigrasian;
- b. Merumuskan kebijakan teknis penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian;
- c. Merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan



- permukiman transmigrasi, fasilitasi penempatan dan pemindahan transmigran, kerjasama kelembagaan, potensi kawasan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat transmigran;
- d. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketransmigrasian;
 - f. Merumuskan kebijakan teknis dan penyelenggaraan koordinasi Pembangunan Wilayah di Kabupaten/Kota;
 - g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi No. 56. Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi mempunyai 4 UPTD yaitu :

1. Balai Latihan Kerja dan Produktifitas (BLKP)

Secara rinci tugas pokok dan fungsi UPTD pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, dapat diuraikan sebagai berikut :

I. BALAI LATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS (BLKP)

Tugas

Melaksanakan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dan pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja disemua sektor usaha pada instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan Koperasi, serta melaksanakan pelatihan bagi para transmigran dan atau calon transmigrasi. Selain itu melaksanakan pelatihan untuk instruktur / tenaga ahli baik swasta maupun pemerintah dari dalam dan luar negeri.

Fungsi

- a. Menyusun rencana dan program, pengembangan system serta kerjasama pelatihan.



- b. Menyiapkan dan melaksanakan pelatihan pencari kerja, tenaga kerja, tenaga pelatihan, tenaga ahli pelatihan, baik swasta maupun pemerintah dari dalam dan luar negeri serta pelaksanaan uji ketrampilan, pelatihan, transmigran dan atau calon transmigran dan penduduk sekitar permukiman serta pelatihan, manajemen dan produktivitas.
- c. Memasarkan program, fasilitas, hasil produksi, jasa dan hasil pelatihan, serta pemberian layanan informasi pelatihan.
- d. Memasyarakatkan produktivitas tenaga ahli.
- e. Mengukur dan menganalisa produktivitas regional, sektoral, perusahaan dan tenaga kerja.
- f. Memberi masukan sebagai bahan pertimbangan penetapan kebijaksanaan pengembangan produktivitas tenaga kerja kepada pemerintah daerah dan swasta.
- g. Mengevaluasi dan melaporkan, memantau hasil pelatihan dan menganalisis data alumni serta jenis pelatihan.
- h. Mengurus tatausaha pengelolaan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Susunan Organisasi Balai Kerja dan Produktivitas , terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kepala Seksi
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Instruktur

II. UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2018 telah terbentuk Balai Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.



UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan berjumlah sebanyak 3 (tiga) UPTD yaitu Wilayah 1 berada di Kabupaten Muara Jambi, Wilayah II berada di Kabupaten Bungo dan Wilayah di berada di Kabupaten Kerinci.

Tugas

UPTD Balai Pengawasan ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas teknis operasional pada dinas dibidang pemeriksaaan dan pelayanan norma kerja dan norma keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Fungsi

- a. Penyusunan rencana, Program Kerja dan anggaran UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis dibidang pembinaan norma kerja dan norma keselamatan kerja dan kesehatan Kerja (K3)
- c. Pelaksanaan Pemeriksaan dan pelayanan dibidang Pengawasan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja (k3)
- d. Pelaksanaan evaluasi dibidang pemeriksaan dan pelayanan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- e. Pelaporan dibidang pemeriksaan dan pelayanan norma kerja dan keselamatan kerja (k3).
- f. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
- g. Pengelolaan pelayanan dibidang pengawasan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
- h. Pemeriksaan bahan evaluasi dibidang pemeriksaan dan pelayanan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
- i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Balai Pengawasan Ketenagakerjaan , terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha



- c. Kepala Seksi
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.

1.3. Aspek Strategis Organisasi

Aspek Strategis dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, didukung dengan regulasi, antara lain :

1. Adanya UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Adanya UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian yang mengubah pendekatan pembangunan transmigrasi dari pendekatan perpindahan penduduk menjadi pendekatan pengembangan kawasan, dengan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan mendorong peran serta masyarakat.
3. Adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan melaksanakan urusan Pemerintahan konkuren yaitu pelaksanaan urusan wajib non Pelayanan Dasar untuk Tenaga Kerja dan Urusan Pilihan untuk Transmigrasi.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

1.4. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Adapun isu strategis yang menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan strategis Pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi adalah sebagai berikut:



a. Isu Strategis Bidang Ketenagakerjaan

Adapun yang menjadi *Isu Strategis* dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Provinsi Jambi adalah :

1. Daya serap tenaga kerja pada sektor formal masih rendah, sementara angkatan kerja dengan pendidikan sarjana terus mengalami peningkatan.
- 2) Daya saing dan produktivitas tenaga kerja masih rendah, yang ditandai dengan rata-rata penduduk yang bekerja berpendidikan SD masih mendominasi.
- 3) Terbatasnya upaya peningkatan kualitas pelatihan tenaga kerja di Balai Latihan Kerja, disamping anggaran yang bersumber dari APBD yang tidak berimbang dengan peningkatan jumlah pencari kerja di Balai Latihan Kerja
- 4) Belum optimalnya peran lembaga pelatihan pemerintah dan swasta dalam menentukan pelatihan kerja sesuai kebutuhan dunia kerja (link and mach)
- 5) Tingginya minat pencari kerja untuk bekerja ke luar negeri, namun terkendala dengan persyaratan yang dibutuhkan.
- 6) Tingginya minat untuk mengikuti program pemagangan ke luar negeri, namun masih terkendala dengan penguasaan bahasa asing, seperti bahasa inggris, cina dan bahasa jepang serta ketatnya proses seleksi yang dipersyaratkan.
- 7) Terbatasnya sumber daya aparatur yang berkualitas dalam menyelenggarakan program-program ketenagakerjaan.
- 8) Belum sinerginya arah dan kebijakan dalam mendorong penciptaan kesempatan di Provinsi Jambi yang dilakukan oleh SKPD dan lintas sektor lainnya.
- 9) Keterbatasan jumlah fungsional pengawasan ketenagakerjaan, menjadi salah satu factor belum optimalnya pengawasan ketenagakerjaan pada perusahaan yang semakin banyal diawasi.



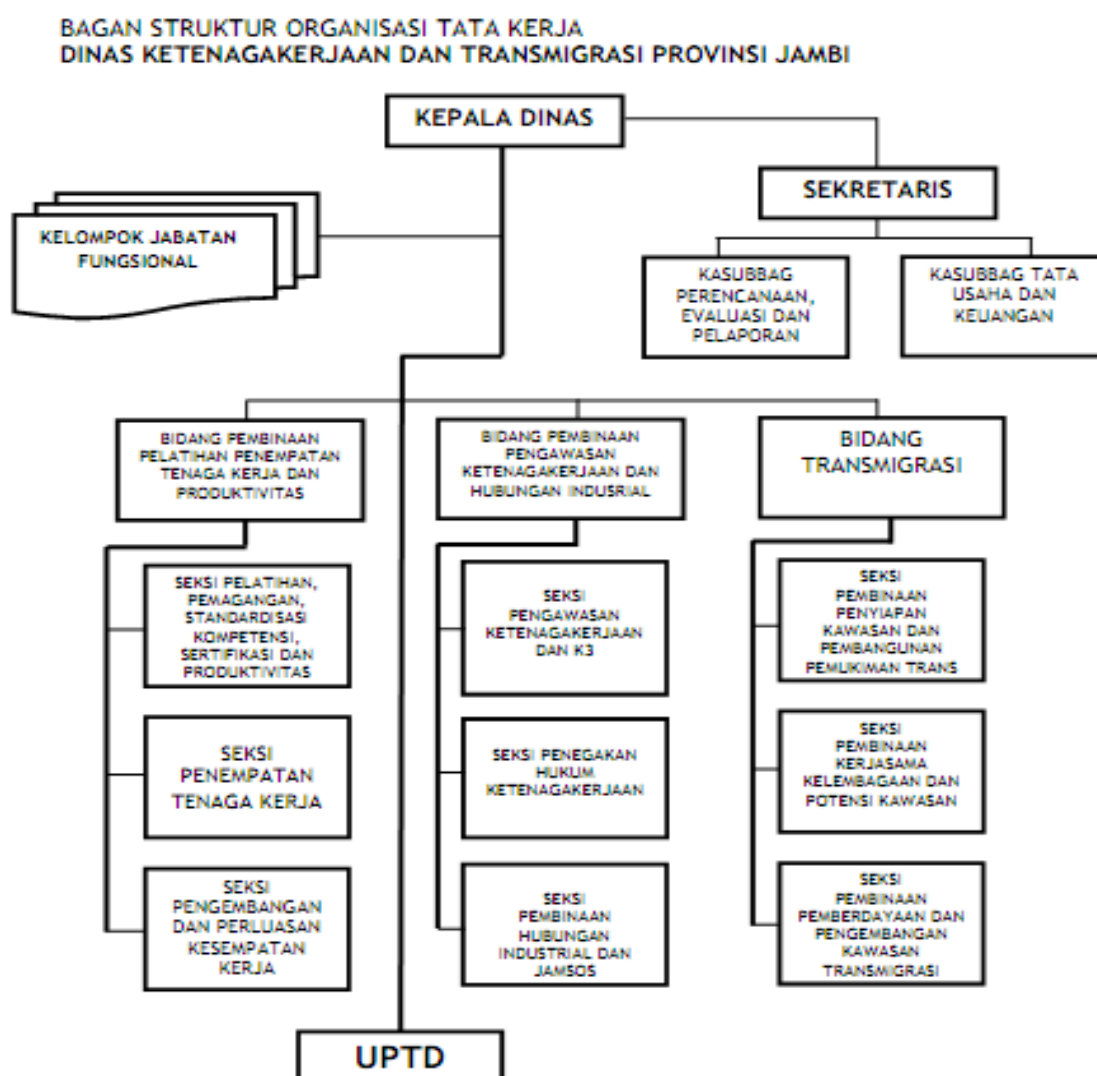
b. Isu Strategis Bidang Ketransmigrasian

Adapun yang menjadi *Isu Strategis* dalam penyelenggaraan ketransmigrasian di Provinsi Jambi adalah :

1. ketersediaan lahan yang dicadangkan untuk program ketransmigrasian semakin terbatas.
- 3) Masih adanya konflik lahan transmigrasi yang belum diselesaikan.
- 4) Masih adanya Lahan Usaha 2 yang tidak dapat diolah dan dikembangkan.
- 5) Masih belum optimalnya kawasan KTM yang telah dikembangkan.
- 6) Tidak adanya OPD ditingkat Kabupaten yang menangani ketransmigrasian.
- 7) Masih banyak Sertifikat Hak para Transmigran belum terbit.

1. 5. Struktur Organisasi

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Nakertrans Provinsi Jambi





1.6 SUMBER DAYA SKPD

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, berjumlah orang, dengan klasifikasi sebagaimana pada **tabel 1.1**.

TABEL 1.1

**JUMLAH PNS DINAS NAKERTRANS PROVINSI JAMBI
(MENURUT KEPANGKATAN)**

Golongan	Pangkat	Ruang	Banyaknya
IV	Pembina Utama	IV-e	0 orang
	Pembina Utama Madya	IV-d	1 orang
	Pembina Utama Muda	IV-c	2 orang
	Pembina Tk. I	IV-b	13 orang
	Pembina	IV-a	16 orang
III	Penata Tk. I	III-d	53 orang
	Penata	III-c	12 orang
	Penata Muda Tk. I	III-b	10 orang
	Penata Muda	III-a	2 orang
II	Pengatur Tk. I	II-d	3 orang
	Pengatur	II-c	2 orang
	Pengatur Muda Tk. I	II-b	0 orang
	Pengatur Muda	II-a	0 orang
I	Juru Tk. I	I-d	0 orang
	Juru	I-c	0 orang
	Juru Muda Tk. I	I-b	0 orang
	Juru Muda	I-a	0 orang
Jumlah			117 orang



TABEL 1.2
JUMLAH PNS DINAS NAKERTRANS PROVINSI JAMBI
(MENURUT JENJANG PENDIDIKAN)

SD	0 orang
SLTP	0 orang
SLTA	7 orang
Diploma 3	2 orang
Diploma 4	0 orang
S-1	78 orang
S-2	28 orang
S-3	0 orang
Jumlah	117 orang

2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi tampak pada

Tabel 1.3 : Sarana dan Prasarana Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi (Data belum terinventarisasi)

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Jumlah	Keterangan
A.	BANGUNAN DAN GEDUNG <ul style="list-style-type: none">Gedung Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi JambiRumah Dinas (Kepala)Gedung UPTD BLKPTempat Beribadah/Mushollah	1 Unit 1 Unit	
B.	PERALATAN DAN MESIN <ul style="list-style-type: none">Alat angkutan kendaraan roda 4		



	<ul style="list-style-type: none">• Alat angkutan kendaraan roda 2• Alat-alat bengkel dan alat-alat ukur• Alat Studio dan Komunikasi<ul style="list-style-type: none">➔ Faksimile➔ Pesawat Telpon	726 Unit	Tahun 1991
--	--	----------	------------

3 Sumber Daya UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktifitas (BLKP)

UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktifitas, merupakan salah satu unsur pelaksana teknis yang secara organisator berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Diawali pada tahun 1982 didirikan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja dan Industri, dengan nama Balai Latihan Kerja dan Industri (BLKI) Jambi, yang diresmikan oleh Menteri Tenaga Kerja RI pada tanggal 14 Februari 1982. Seiring dengan perubahan dan proses dinamika perkembangan sistem pemerintahan yang dimulai sejak berakhirnya masa orde baru, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan dilakukan penyempurnaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian sebagai bentuk implementasi penyelenggaraan otonomi daerah, maka melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2002 telah terjadi perampingan struktur organisasi dan tata kerja dengan bergabungnya 3 (tiga) lembaga pelatihan setingkat Eselon III yaitu Balai Latihan Kerja Industri (BLKI), Balai Latihan Transmigrasi (Balatrans) dan Balai Pengembangan Produktivitas Daerah (BPPD) menjadi 1 (satu) unit Pelaksana Teknis Dinas dengan nama Balai Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (BPTT), dan mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2018, tentang Pembentukan, susunan organisasi dan tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja dan Produktifitas Disnakertrans Provinsi Jambi.

Sebagai salah satu sumber daya yang dimiliki Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, maka BLK diharapkan menjadi potensi dalam mendorong penciptaan kesempatan kerja melalui upaya peningkatan kualitas pelatihan, penyiapan sarana



dan prasarana pelatihan serta instruktur yang berpengalaman. Berikut disajikan Sumber Daya yang dimiliki Balai Latihan Kerja (BLK)/UPTD BPTT Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, sebagaimana pada **tabel 1.4** berikut.

Tabel 1.4. Sarana dan Prasarana UPTD Balai Latihan Kerja Produktivitas (BLKP) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi

NO.	URAIAN	LUAS	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Gedung Kantor BPTT	225 M2	1 Buah	
2.	Gedung Teori (Tata Niaga)	504 M2	1 Buah	
3.	Gedung Bengkel Bangunan	567 M2	1 Buah	
4.	Gedung Bengkel Automotif	1.134 M2	1 Buah	
5.	Gedung Bengkel Tekmek (Las)	819 M2	1 Buah	
5.	Gedung Bengkel Listrik	567 M2	1 Buah	
7.	Gedung Gudang	72 M2	1 Buah	
8.	Gedung Aula	-	1 Buah	
9.	Gedung Kantin	100 M2	1 Buah	
10.	Gedung Mess	36 M2	1 Buah	
11.	Pos Jaga	9 M2	1 Buah	
12.	Gedung Garasi	96 M2	1 Buah	
13.	Gedung Menjahit	-	1 Buah	
14.	Rumah Dinas	1.850 M2	35 Buah	
15.	Taman,Halaman, Kebun & Jalan	42.742 M2	-	
16.	Parkir	54 M2	-	
17.	WC	81 M2	-	
18.	Selasar	1.080 M2	-	
19.	Mussholla	64 M2	1 Buah	

Sumber : BLKP Provinsi Jambi, 2024

Selain itu, guna menunjang terselenggaranya kegiatan pelatihan pada UPTD BLKP Provinsi Jambi, berikut dapat dilihat personil UPTD BLKP sebagaimana **tabel 1.5** berikut.



Tabel 1.5. Jumlah Pegawai/Staf UPTD Balai Latihan Kerja Produktivitas (BLKP) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi

NO.	URAIAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
A. JABATAN STRUKTURAL				
1.	Ka. UPTD (Eselon III.b)	1 Orang	1 Orang	-
2.	Kasubbag TU (Eselon IV.a)	1 Orang	-	1 Orang
3.	Kasi (Eselon IV.a)	2 Orang	1 Orang	1 Orang
4.	Staf Pelaksana/Fungsional Umum	1 orang	1 orang	-
B. JABATAN FUNGSIONAL				
1.	Tenaga Instruktur	6 orang	3 orang	3 orang
Jumlah		11 orang	6 orang	5 orang

Sumber : TU, UPTD BLKP 2024

Jenis Pelatihan yang dilaksanakan di UPTD BPTT (BLK) Provinsi Jambi, dapat dilihat pada **tabel 2.6** berikut.

Tabel 1.6. Spesifikasi dan Jenis Pelatihan pada Balai Latihan Kerja Produktivitas (BLKP) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi

No.	JURUSAN DAN JENIS PELATIHAN	LAMANYA/JAM LATIHAN
A. JURUSAN AUTOMOTIF		
1.	Sepeda Motor	25 hari (200 JAMLAT)
B. JURUSAN LISTRIK		
1.	Tehnisi HP	25 hari (200 JAMLAT)
2.	Instalasi Listrik	25 hari (200 JAMLAT)
3.	Tehnisi Video	25 hari (200 JAMLAT)
C. JURUSAN TEHNIK		
1.	Las Listrik	25 hari (200 JAMLAT)
D. JURUSAN TATA NIAGA		
1.	Desain Grafis	25 hari (200 JAMLAT)
2.	Multimedia	25 hari (200 JAMLAT)
E. JURUSAN ANEKA		



1.	Menjahit	25 hari (200 JAMLAT)
F. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT		
1.	Roti dan Kue	25 hari (200 JAMLAT))

Sumber : UPTD BLKP Provinsi Jambi, 2024

4 Mitra Kerja

Dalam penyelenggaraan pelayanan SKPD, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mempunyai mitra kerja dengan berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga swasta, seperti pada **Tabel 2.7.**

Tabel 1.7. Mitra Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi

No	MITRA KERJA	JUMLAH
1.	BPJS Ketenagakerjaan	1 Lembaga
2.	Lembaga Pelatihan Kerja swasta	158 Lembaga
3	Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta	27 buah
4	Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)	1 Lembaga
5	Organisasi Pekerja (Federasi/Konfederensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh)	282 buah
6	Lembaga Kerja (LKS) Bipartit	1 perusahaan 1 LKS
7	Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)	1 Pembina
8	- Dewan Pengupahan Provinsi Jambi - Dewan Pengupahan Kabupaten / Kota	1 Dewan 4 Dewan

1.7 Sistematika Penulisan.

Mempedomani Permenpan Nomor 53 tahun 2014 Penyusunan Lkj Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Trasnigrasi Provinsi Jambi Tahun 2023 terdiri dari beberapa bab sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Dasar Pembentukan Organisasi
- 1.2 Tugas Pokok, Fungsi
- 1.3. Aspek Strategis Organisasi



- 1.4. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- 1.5. Struktur Organisasi
- 1.6. Sumber Daya Manusia
- 1.7. Sistematika Penulisan

BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
 2. Indikator Kinerja
 3. Strategi dan Arah Kebijakan
 4. Program dan Kegiatan
- 2.2. Perjanjian Kinerja

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama
 - 3.1.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
 - 3.1.3. Capaian IKU Tahun 2023 dengan tahun 2022 dan tahun 2021.
 - 3.1.4. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2021-2026
 - 3.1.5. Analisis atas efisiensi terhadap Penggunaan Sumber Daya
 - 3.1.6. Analisis Program Kegiatan yang menunjang Keberhasilan
- 3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2023
 - 3.2.1. Program dan Kegiatan
 - 3.2.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan .

BAB IV. PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Visi Pembangunan Provinsi Jambi yaitu : “***Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT***” Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang dituangkan ke dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 – 2026 yang merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi untuk periode 5 (lima) tahun dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi akan mendukung terlaksananya Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tersebut.

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau merupakan penjabaran atau implementasi untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis dalam Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang dihadapi.

a. Tujuan

Adapun Tujuan untuk mencapai Visi dan Misi Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi tahun 2021-2026 menyelenggarakan, yaitu :

1) Tujuan Penyelenggaraan Bidang Ketenagakerjaan, antara lain :

- a. Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja.
- b. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
- c. Terwujudnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.



2) Tujuan Penyelenggaraan Bidang Ketramigrasian :

Terwujudnya Pengembangan Wilayah Transmigrasi berbasis Kawasan.

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan diharapkan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan dan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketramigrasian di Provinsi Jambi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun sasaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi tahun 2021-2026, yaitu :

1) Sasaran Penyelenggaraan Bidang Ketenagakerjaan, antara lain :

- a. Meningkatnya Kesempatan Kerja Sektor Formal dalam dan Luar Negeri.
- b. Meningkatnya Kualitas SDM Tenaga Kerja.
- c. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja.

2) Sasaran Penyelenggaraan Bidang Transmigrasi, antara lain :

- a. Meningkatnya Cakupan Kawasan yang layak huni dan berkembang dan Layak penempatan.



2. Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang.

Indikator kinerja SKPD sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/ hasil) dari kegiatan (output/ keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Dalam hal ini, dalam melihat kinerja daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (**key performance indicator**). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja suatu organisasi, maka



indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 menuju JAMBI TUNTAS 2021 dapat diuraikan pada lampiran tabel 2.1. **Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.**



Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Nakertrans Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5).	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG KETENAGAKERJAAN									
1	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Meningkatnya peluang kesempatan sektor formal dalam dan luar negeri	Persentase tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan	30%	30,10%	30,20%	30,30%	30,40%	30,50%
2	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas SDM tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi kompetensi	5,00%	5,10%	5,20%	5,30%	5,40%	5,50 %
			Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %
3	Terwujudnya perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja	Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan kepatuhan terhadap norma-norma ketenagakerjaan	75%	76%	77%	78%	79%	80%
			Persentase peningkatan kelembagaan ketenagakerjaaan	9,5	9,6%	9,7%	9,8%	9,9%	10 %



URUSAN PILIHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
4	Terwujudnya pengembangan Wilayah Transmigrasi Berbasis Kawasan	Meningkatkan cakupan kawasan yang layak huni.	Jumlah kawasan Pemukiman Transmigrasi yang berkualitas	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi
			Persentase Pemukiman dan kawasan serta masyarakat transmigrasi yang sejahtera	24,00	24,89	25,8 %	27,61 %	45,08 %	73,07 %
			Nilai rata indeks Perkembangan Transmigrasi yang di revitalisasi dalam Program Prioritas Nasional	32,14	33,82	35,18	35,64	36,09	36,33
			Nilai rata indeks Perkembangan Transmigrasi yang di revitalisasi dalam Program Prioritas Kementerian	40,27	40,59	41,47	41,8	42,22	43,11
			Jumlah areal yang dicadangkan untuk Lokasi Transmigrasi yang clear dan clean	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi



5.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	83,09	84,00	84,01	84, 02	84,03	84,04
		Meningkatnya Kualitas implementasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	68,00	69,00	70,01	70,01	73,00	76,00

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan adalah suatu langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran dari misi yaitu dalam rangka memecahkan permasalahan Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi.

Arah strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Jambi adalah untuk mencapai bidang pembangunan :

a. Ketenagakerjaan, yaitu

- Meningkatkan kesempatan kerja sektor formal dan informal dalam dan luar negeri bagi pencari kerja dan angkatan kerja.
- Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Meningkatkan Kualitas Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Masyarakat.
- Meningkatkan Kualitas dan Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Kewirausahaan
- Meningkatkan Pelatihan Produktivitas bagi tenaga kerja yang produktif
- Meningkatkan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja swasta
- Menyelenggarakan Program Pemagangan bagi pencari kerja.
- Melaksanakan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.
- Meningkatkan kualitas SDM dalam penyelenggaraan pelatihan kerja
- Meningkatkan kompetensi dalam penyelenggaraan pelatihan kerja.
- Meningkatkan peran Lembaga Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- Meningkatkan ketenangan bekerja dan berusaha bagi tenaga kerja dan perusahaan.

- Meningkatkan penerapan Norma-Norma Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

b. Ketramigrasian, yaitu

- Mengembangkan wilayah transmigrasi berbasis masyarakat desa.
- Mendorong peningkatan usaha produktif bagi warga binaan transmigrasi.
- Mendorong pengembangan kawasan KTM yang produktif.

Strategi Bidang Ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut :

1). Meningkatkan kesempatan kerja sektor formal dan informal dalam dan luar negeri bagi pencari kerja dan angkatan kerja, dengan cara :

- Meningkatkan mekanisme pelayanan penempatan tenaga kerja.
- Memperluas akses kesempatan kerja dalam dan luar negeri.
- Memperluas Kesempatan Kerja Sektor Informal melalui Pembentukan Wira Usaha Baru (WUB)
- Mengendalikan penggunaan tenaga kerja asing.
- Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dalam bidang penempatan tenaga kerja.
- Melakukan penyuluhan bagi Calon Tenaga Kerja ke Luar Negeri.
- Menyusun analisa dan rekomendasi peluang kesempatan kerja pada sektor usaha informal yang produktif.
- Mengevaluasi hasil capaian dan penyempurnaan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Jambi.
- Memberdayakan tenaga kerja mandiri terdidik dan tenaga kerja Pemuda Mandiri (TKPMP)
- Mendorong penggunaan Tenaga Kerja Sarjana (TKS).
- Memberdayakan Masyarakat melalui Padat Karya Produktif.
- Penguatan Lembaga Bursa Kerja Khusus (BKK)/Bursa Kerja Swasta.

- Meningkatkan kualitas Fungsional Pengantar Kerja dan Antar Kerja.
- Mengembangkan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- Menyediakan informasi pasar kerja (IPK).
- Meningkatkan Koordinasi Pengiriman dan Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri.
- Meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah melalui Rapat Kerja Teknis dalam Bidang Penempatan Tenaga Kerja.
- Peningkatan Pelayanan kerja terhadap disabilitas
- Menyusun kerangka rekomendasi kebijakan penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja melalui monitoring sektor formal dan informal.

2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Latihan Kerja, dengan cara :

- Peningkatan pelayanan pelatihan bagi pencari kerja di Balai Latihan Kerja berbasis Kompetensi.
- Peningkatan Pelayanan Pelatihan berbasis masyarakat melalui Mobile Training Unit (MTU) ke Kabupaten/Kota.
- Peningkatan Life Skill Santri/Santriawan Program Dumisake 60 Pesantren/Tahun.
- Pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga instruktur pada Balai Latihan Kerja.
- Pelaksanaan uji kompetensi tenaga kerja non konstruksi yang disertifikasi sesuai kompetensi.
- Pelaksanaan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan Balai Latihan Kerja dalam rangka menunjang pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- Meningkatkan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)
- Melaksanakan Kompetisi bagi Instruktur di BLK/LPKS.

- Mendorong peningkatan kualitas pengelola pelatihan dan instruktur melalui upgrading.
- Memonitor hasil pelaksanaan pelatihan di BLK bagi tenaga kerja yang telah terserap di pasar kerja.

3.) Meningkatkan Pelatihan Produktivitas bagi tenaga kerja yang produktif, dengan cara :

- a. Melakukan uji kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kerja;
- b. Mendorong produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan produktivitas tenaga kerja yang berorientasi dari produktivitas rendah ke produktivitas yang tinggi.
- c. Mendorong peningkatan kewirausahaan produktif
- d. Menyiapkan skema pembiayaan dan SDM yang berkualitas untuk mengikuti pemagangan ke luar negeri pada sektor industri dan tenaga medis/perawat
- e. Menyediakan akses program pemagangan dalam negeri.
- f. Meningkatkan koordinasi ke luar negeri dalam rangka pengiriman dan penempatan peserta magang.

4) Meningkatkan peran Lembaga Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan cara :

- a. Mendorong perluasan kepersertaan BPJ Ketenagakerjaan

5) Meningkatkan ketenangan bekerja dan berusaha bagi tenaga kerja dan perusahaan, dengan cara :

- a. Menurunkan jumlah pekerja anak di Provinsi Jambi;
- b. Menurunkan pelanggaran hukum di bidang ketenagakerjaan;
- c. Mendorong perusahaan dalam menerapkan norma ketenagakerjaan.
- d. Meningkatkan optimalisasi dan kualitas pengawasan Norma Ketenagakerjaan
- e. Meningkatkan penerapan K3 dan SMK3

- 6) Meningkatkan penerapan Norma-Norma Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dengan cara :
- Membahas hasil survey KHL dan pengupahan (UMP).
 - Melaksanakan pengujian lingkungan kerja sesuai standar.
 - Melaksanakan pelatihan Ahli K3 Umum.
 - Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan
 - Meminalisir terjadinya perselisihan Hubungan Industrial.
 - Mendorong perusahaan dalam menyusun struktur dan skala upah.
 - Meningkatkan fungsi Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit.
 - Meningkatkan fungsi Lembaga Kerja Sama Tripartit.
 - Melakukan penyidikan tindak pidana dalam bidang ketenagakerjaan.

Strategi, Bidang Ket transmigrasian yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan wilayah transmigrasi berbasis masyarakat desa, dengan cara meningkatkan penyediaan lahan bagi penempatan transmigrasi.
- 2) Mendorong peningkatan usaha produktif bagi warga binaan transmigrasi, dengan cara :
Meningkatkan pemanfaatan lahan usaha yang ada dengan penguatan kepemilikan Lahan Transmigran.
- 3) Mendorong pengembangan kawasan KTM yang produktif, dengan cara mempercepat fungsi Kawasan KTM yang lebih produktif melalui pengembangan sektor-sektor potensial yang cepat tumbuh dan mendorong percepatan pertumbuhan Kawasan.

Strategi, Bidang Pelayanan Organisasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan administrasi dengan berorientasi pada peningkatan kinerja dan kebutuhan pelayanan.
- b. Meningkatkan ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang efektif sesuai dengan proporsi kerja yang dibebankan kepada SKPD.
- c. Meningkatkan disiplin aparatur melalui pemenuhan kebutuhan aparatur yang efektif dan efisien.
- d. Meningkatkan kapasitas dan SDM aparatur melalui pembinaan dan peningkatan pengetahuan aparatur.
- e. Meningkatkan Sistem Pengembangan Sistem Pelaporan Organisasi, melalui penajaman visi dan misi organisasi dan Pemerintah Provinsi Jambi ke dalam Perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan Pelayanan Organisasi.

4. Program dan Kegiatan

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, sebagai salah satu SKPD yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan 2 (dua) urusan, yaitu 1 (satu) urusan wajib non pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan serta 1 (satu) urusan pilihan bidang ketransmigrasian, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2021, tentang Nomenklatur Program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi.

Adapun Program dan kegiatan Dinas Tenaga dan Transmigrasi Provinsi Jambi pada tahun 2021, adalah sebagai berikut :



I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

II. Program Perencanaan Tenaga Kerja.

- 1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

III. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja

- 1) Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.
- 2) Pengukuran Produktifitas Tingkat Daerah

IV. Program Penempatan Tenaga Kerja

- 1) Pelayanan antar Kerja Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi Jambi

V. Program Hubungan Industri

- 1) Pencegahan dan Penyelesaian perselisihan Hubungan Industri , Mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada Kepentingan di (satu) Daerah Provinsi Jambi .



- 2) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK) .

VI. Program Pengawasan Ketenagakerjaan .

- 1) Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan.

VII. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi.

- 1) Pencadangan Tanah untuk kawasan Transmigrasi

VIII. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

- 1) Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jambi.

IX. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

- 1) Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan.

2.2 Perjanjian Kinerja.

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari Implementasi Rencana Strategis 2021 – 2026 diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi menetapkan target untuk masing masing sasaran yang harus dicapai, target ini dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kerja Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Peluang kesempatan kerja sektor formal dalam dan luar Negeri	Persentase Tenaga Kerja Terdaftar yang ditempatkan	30,30 %
2.	Meningkatnya Kualitas SDM Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih dan bersertifikasi Kompetensi	5,30 %
		Persentase Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	2,5 %
3.	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Kepatuhan Norma – Norma Ketenagakerjaan	78 %
		Persentase Peningkatan Kelembagaan Ketenagakerjaan	9,8 %



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Meningkatnya Cakupan Kawasan yang layak huni	Jumlah kawasan pemukiman transmigrasi yang berkualitas	1 Lokasi
		Nilai rata-rata inndeck Perkembangan Transmigrasi yang di revitalisasi dalam program prioritas nasional	35,64 Indeks
		Nilai rata-rata inndeck Perkembangan Transmigrasi yang di revitalisasi dalam program prioritas Kementerian	41,8 Indeks
		Persentase Pemukiman dan kawasan serta masyarakat Transmigrasi yang sejahtera	27,61 %
		Jumlah areal yang dicadangkan untuk lokasi Transmigrasi yang Clear dan Clean	1 Lokasi
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai IKM untuk Kepuasan Masyarakat	84,02
		Jumlah Nilai SAKIP	70,01

Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja
4. Program Penempatan Tenaga Kerja
5. Program Hubungan Industrial
6. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
7. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
8. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
9. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Jumlah

Anggaran

Rp. 20.875.177.859,-
Rp. 36.000.000,-
Rp. 6.826.952.362,-
Rp. 294.952.650,-
Rp. 150.940.000,-
Rp. 447.000.000,-
Rp. 25.000.000,-
Rp. 80.095.500,-
Rp. 131.904.500,-

Rp. 28.386.130.221

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pendekatan Manajemen Pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Sebagai bagian dari komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan web-monev nantinya menjadi mendorong pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).



Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Kriteria
1.	91 % \leq 100 %	Sangat Tinggi	
2.	76 % \leq 90 %	Tinggi	
3.	66 % \leq 75 %	Sedang	
4.	51 % \leq 65 %	Rendah	
5.	\leq 50 %	Sangat rendah	

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Capaian Perjanjian Kinerja dan IKU Tahun 2024

Tabel 3.2

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Sasaran Strategis 1				
Meningkatnya Peluang Kesempatan Kerja Sektor Formal dalam dan Luar Negeri				
Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% (Capaian)	Kriteria
Persentase tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan.	30,30	34,9	115	
Sasaran Strategis 2				
Meningkatnya Kualifas SDM Tenaga Kerja				
Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% (Capaian)	Kriteria
Persentase Tenaga Kerja yang dilatih dan bersertifikasi Kompetensi	5,30	5,44	103	
Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga kerja	2,5	5,5	220	
Sasaran Strategis 3				
Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja				
Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% (Capaian)	Kriteria



Persentase Peningkatan Kepatuhan terhadap norma norma Ketenagakerjaan	78	98,60	126	
Persentase Peningkatan Kelembagaan Ketenagakerjaan	9,8	15,76	160	
Sasaran Strategis 4				
Meningkatnya Cakupan Kawasan yang layak huni				
Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% (Capaian)	Kriteria
Jumlah Kawasan pemukiman Transmigrasi yang berkualitas	1 Lok	1 Lok	100	
Nilai rata – rata indeks perkembangan Transmigrasi yang direvitalisasi dalam program prioritas nasional	35,64 Indeks	52,56 Indeks	147	
Nilai rata – rata indeks perkembangan Transmigrasi yang direvitalisasi dalam program prioritas kementerian	41,8 Indeks	55,60 Indeks	133	
Persentase Pemukiman dan Kawasan serta masyarakat transmigrasi yang sejahtera	27,61	51,27	185	
Jumlah areal yang dicadangkan untuk lokasi transmigrasi yang clear dan clean	1 Lok	1 Lok	100	

Sasaran Strategis 5 <i>Perjanjian Kinerja</i>				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Akuntabilitas Kerja dan Keuangan				
Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% (Capaian)	Kriteria
Nilai IKM Untuk Kepuasan Masyarakat	84,01	84,91	101	B
Nilai SAKIP	70,01	70,60	101	BB

3.1.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi telah menetapkan sebanyak 5 Sasaran Strategis yang akan dicapai. Ke 5 sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan 12 Indikator Kinerja.

1. SASARAN STRATEGIS SATU

” Meningkatkan Peluang Kesempatan Kerja Sektor Formal dalam dan Luar Negeri “

Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi pada sasaran I (satu) ini telah memberikan capaian ***Sangat tinggi*** target ini terlihat dari angka realisasi 115 persen. Secara spesifik realisasi kinerja sasaran strategis 1 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1				
Meningkatnya Peluang Kesempatan Kerja Sektor Formal dalam dan Luar Negeri				
Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% (Capaian)	Kriteria
Persentase tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan.	30,30	34,9	115	

Analisis atas capaian indikator-indikator sasaran 1 adalah sebagai berikut

Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja Yang terdaftar}} \times 100$$

Capaian kinerja Tenaga Kerja terdaftar yang ditempatkan di Provinsi Jambi sebagaimana tabel tersebut diatas menunjukkan kinerja yang ***Sangat tinggi*** pada Tahun 2024. Capaian ini menyumbang sebanyak 34,9 % dari target yang telah ditetapkan. Dengan target pada Renstra 2024 sebesar 30,30 % dan Capaian pada 2024 sebesar 115 %, kondisi ketenagakerjaan pada tahun 2024 ini cukup baik,

seiring berakhirnya covid -19,dan telah berangsur pulihnya Perekonomian Nasional secara umum dan Provinsi Jambi Khususnya, dengan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 2.027 orang dari tenaga Kerja yang terdaftar di Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi sebanyak 5.802 orang, untuk tahun 2024 terjadinya peningkatan penempatan tenaga kerja dan tenaga kerja yang mendaftar.

2. SASARAN STRATEGIS DUA

” Meningkatkan Kualitas SDM Tenaga Kerja “

Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi pada sasaran II (dua) ini telah memberikan capaian Sangat Tinggi ini terlihat dari 2 (dua) indikator angka realisasi kategori yang sangat tinggi. Secara spesifik realisasi kinerja sasaran strategis 2 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2				
Meningkatnya Kualitfas SDM Tenaga Kerja				
Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase capaian	Kriteria
Persentase Tenaga Kerja yang dilatih dan bersertifikasi Kompetensi	5,30	5,44	103	
Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga kerja	2,5	5,51	220	

Analisis atas capaian indikator-indikator sasaran 2 adalah sebagai berikut

Formulasi Perhitungan :

1. $\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih dan bersertifikasi}}{\text{Jumlah Pengangguran terbuka Tahun -n}} \times 100$ (50 %)

2. Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Tahun - N

Capaian kinerja Tenaga Kerja yang dilatih dan bersertifikasi di Provinsi Jambi sebagaimana tabel tersebut diatas menunjukkan kinerja yang **sangat tinggi** pada Tahun 2024. Capaian ini menyumbang sebanyak 5,44 % dari target yang telah ditetapkan. Dengan target pada Renstra 2024 sebesar 5,30 % dan Capaian pada 2023 sebesar 103 %, dengan jumlah tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi sebanyak 2.340 orang dari Jumlah Pengangguran Terbuka Tahun 2024 (50 %) Provinsi Jambi dengan jumlah 43.027 orang. Untuk Capaian Kinerja Peningkatan Produktivitas sebesar 5,51 % dari target yang ditetapkan dalam renstra sebesar 2,5 %.

3. SASARAN STRATEGIS TIGA

” Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja “

Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi pada sasaran III (tiga) ini telah memberikan capaian yang **sangat tinggi** ini terlihat dari angka realisasi 126 persen dan 160 persen . Secara spesifik realisasi kinerja sasaran strategis 3 dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5 Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis 3				
Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja				
Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase	Kriteria
Persentase Kepatuhan terhadap norma norma Ketenagakerjaan	78	98,60	126	
Persentase Peningkatan Kelembagaaan Ketenagakerjaan	9,80	15,76	160	

Analisis atas capaian indikator-indikator sasaran 3 adalah sebagai berikut

Formulasi Perhitungan :

1. $\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah Perusahaan yang terdaftar}} \times 100$
2. $\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang telah Terbentuk Bipartit}}{\text{Jumlah Perusahaan yang telah memenuhi Kriteria}} \times 100$

Capaian kinerja Kepatuhan terhadap norma norma Ketenagakerjaan di Provinsi Jambi sebagaimana tabel tersebut diatas menunjukkan kinerja yang **sangat tinggi** pada Tahun 2024. Capaian ini menyumbang sebanyak 126 % dari target yang telah ditetapkan. Dengan target pada Renstra 2023 sebesar 78 % dan Capaian pada 2024 sebesar 98,60 %, dengan jumlah Perusahaan yang telah menerapkan Norma Ketenagakerjaan sebanyak 15.544 Perusahaan di Kabupaten/Kota se Provinsi jambi dari Jumlah Perusahaan yang terdaftar dalam Wajib Lapor Perusahaan sebanyak 15.775 Perusahaan. Untuk Capaian persentase Peningkatan Kelembagaan Ketenagakerjaan sebesar 15,76 % , atau 160 % dari target yang ditetapkan dalam renstra 9,80 %, dengan jumlah perusahaan yang telah terbentuk bipartit sebanyak 170 perusahaan dari jumlah perusahaan yang memenuhi Kriteria sebanyak 1.078 Perusahaan.

4. SASARAN STRATEGI SEMPAT

” Meningkatkan Cakupan Kawasan yang layak huni “

Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi pada sasaran IV (empat), terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja. Secara spesifik realisasi kinerja sasaran strategis 4 dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut :



Tabel 3.6 Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis 4				
Meningkatnya Cakupan Kawasan yang layak huni				
Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% (Capaian)	Kriteria
Jumlah Kawasan pemukiman Transmigrasi yang berkualitas	1 Lok	1 Lok	100	
Nilai rata – rata indeks perkembangan Transmigrasi yang direvitalisasi dalam program prioritas nasional	35,64 Indeks	52,56 Indeks	147	
Nilai rata – rata indeks perkembangan Transmigrasi yang direvitalisasi dalam program Prioritas Kementerian	41,8 Indeks	55,60 Indeks	133	
Persentase Pemukiman dan Kawasan serta masyarakat transmigrasi yang sejahtera	27,61	51,27	185	
Jumlah areal yang dicadangkan untuk lokasi transmigrasi yang clear dan clean	1 Lok	1 Lok	100	

Analisis atas capaian indikator-indikator sasaran 4 adalah sebagai berikut**Formulasi Perhitungan :**

1. *Jumlah Ketersediaan Lokasi Transmigrasi Pemukiman Tahun – N yang difasilitasi dan dikordinasikan*
2. *Nilai rata – rata indeks perkembangan transmigrasi yang direvitalis dalam Program Prioritas Nasional*
3. *Nilai rata – rata indeks perkembangan transmigrasi yang direvitalis dalam Program Prioritas Kementerian*
4.
$$\frac{\text{Jumlah lahan bidang yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Total Lahan Bidang yang bermasalah (13.457)}} \times 100$$
5. *Jumlah Perencanaan Pencadangan Tanah Tahun – N yang difasilitasi dan dikordinasikan.*

Capaian kinerja peningkatan Kawasan penempatan Transmigrasi yang layak huni dengan 5 (tiga) Indikator Kinerja sebagaimana tabel tersebut diatas menunjukkan kinerja masing - yang **Sangat Tinggi** pada Tahun 2024, sebagai berikut dapat dijelaskan :

1. Indikator Kinerja Jumlah Kawasan Pemukiman Transmigrasi yang berkualitas.
Hasil Fasiltasi dan Koordinasi Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi pada tahun 2024, terdapat 1 Lokasi Calon Penempatan Transmigran, yang berada di Desa Sungai Aur, Kecamatan Kumpeh Iir Kabupaten Muaro Jambi.
2. Indikator Kinerja Persentase Pemukiman dan kawasan serta masyarakat Transmigrasi yang sejahtera.
Pada Tahun 2024 Capaian Kinerja sebesar 51,27 %, atau 185 % dari Target dalam Renstra sebesar 27,61 % . Dengan jumlah bidang lahan yang sudah terselesai sertifikatnya sebanyak 6.900, dari total jumlah lahan yang bermasalah sebanyak 13.457 bidang lahan
3. Indikator Kinerja Nilai rata – rata indeks perkembangan transmigrasi yang direvitalis dalam Program Prioritas Nasional. Pada Tahun 2024 capaian Nilai rata – rata indeks perkembangan Transmigrasi yang direvitalisasi dalam Program Prioritas nasional capaian sebesar 52,56 Indeks , atau 147 % dari Target dalam Renstra sebesar 35,64 indeks.
4. Indikator Kinerja Nilai rata – rata indeks perkembangan transmigrasi yang direvitalis dalam Program Prioritas Kementerian. Pada Tahun 2024 capaian Nilai rata – rata indeks perkembangan Transmigrasi yang direvitalisasi dalam Program Prioritas Kementerian capaian sebesar 51,27 Indeks , atau 185 % dari Target dalam Renstra sebesar 27,61 indeks.
5. Indikator Kinerja Jumlah areal yang dicadangkan untuk lokasi Transmigrasi yang clear dan clean.
Hasil Fasilitasi dan koordinasi Disnakertrans Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten , terdapat 1 Lokasi potensi sebagai calon lokasi Transmigrasi

baru, yang berada di Sungai Nibung, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun.

5. SASARAN STRATEGIS KELIMA

” Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kerja “

Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi pada sasaran 5 (lima) ini telah memberikan capaian yang **sangat tinggi** ini terlihat dari Nilai IKM angka capaian angka 101 %, dari target 84,01 % dengan Realisasi sebesar 84,91 % , untuk nilai SAKIP, target 70,01 % dan realisasi sebesar 70,60 % Secara spesifik realisasi kinerja sasaran strategis 5 dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7 Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis 5 <i>Perjanjian Kinerja</i>				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja				
Nilai IKM Untuk Kepuasan Masyarakat	84,01	84,91	101	
Nilai SAKIP	70,01	70,60	101	

Capaian kinerja Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana tabel tersebut diatas menunjukan kinerja yang baik pada Tahun 2024. Untuk IKM penilaian yang dilaksanakan tim Survey dari Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi pada tahun 2024, dengan target pada perjanjian kinerja 84,01 %, realisasinya 84,91 % dengan kategori “B”, dan Nilai SAKIP untuk tahun 2023 penilaiannya pada Tahun 2024 target 70,01 % , realisasi 70,60 % dengan Kategori “BB” .



3.1.3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 dengan tahun lalu (2023) dan beberapa tahun terakhir (2022)

Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	% (Capaian)		Capaian 2024		
		2022	2023	Target	realisasi	% (Capaian)
1	Persentase tenaga kerja yang terdaftar yang ditempat.	102,4	100,9	30,30	34,9	115
2	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih dan bersertifikasi Kompetensi	175,4	133	5,30	5,44 %	103
3	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga kerja	200 %	204	2.5	5,51	220
4	Persentase Kepatuhan terhadap norma norma Ketenagakerjaan	116,25	126,8	78	98,60	126
5	Persentase Peningkatan Kelembagaan Ketenagakerjaan	129,1	155,9	9,80	15,76	160
6	Jumlah Kawasan Pemukiman Transmigrasi yang berkualitas	100 %	100 %	1 Lok	1 Lok	100 %
7	Nilai rata – rata indeks perkembangan Transmigrasi yang direvitalisasi dalam program prioritas nasional	142,19	129,2	35,64 Indeks	52,56 Indeks	147
8	Nilai rata – rata indeks perkembangan Transmigrasi yang direvitalisasi dalam program Prioritas Kementerian	134,56	126,7	41,8 Indeks	55,60 Indeks	133
9	Persentase Penyelesaian Permasalahan Lahan Transmigrasi	222	188	27,61	51,27	185
10	Jumlah Areal yang dicadangkan untuk areal Transmigrasi yang Clear dan Clean	100	100	1 Lok	1 Lok	100
11	Nilai IKM Untuk Kepuasan Masyarakat	93,2	97,19	84,01	84,91	101
12	Jumlah Nilai IKM	94,1	96,92	70,01	70,60	101

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.

1. Capaian kinerja Tenaga Kerja terdaftar yang ditempatkan di Provinsi Jambi sebagaimana tabel 3.8 tersebut, pada tahun 2022 sebesar 102,4 % , kemudian pada tahun 2023 menjadi 100, %, dan pada tahun 2024 115 %, dengan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 2.027 meningkat dibandingkan pada tahun 2023 sebanyak 1.930 orang, dan tenaga kerja yang mendaftar sebanyak 5.802 dari tenaga Kerja yang terdaftar di Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi turun, dibanding tahun 2023 sebanyak 6.327 orang yang mendaftar.
2. Capaian kinerja Tenaga Kerja yang dilatih dan bersertifikasi di Provinsi Jambi sebagaimana tabel 3.8 tersebut, pada Tahun 2022 capaian sebesar 175,4 %, dan pada tahun 2023 turun sebesar 133 %, dan pada tahun 2024 sebesar 103 % dengan jumlah tenaga kerja yang dilatih sebanyak 2.340 orang yang berasal dari Pelathan Live Skill bagi Santri dan Santriawan, Dana APBN dan beberapa kegiatan pelatihan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Capaian kinerja Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana tabel 3.8 tersebut diatas, Pada Tahun 2022 Capaiannya 200 %, pada Tahun 2023 naik capaiannya sebesar 204 % dan Pada Tahun 2024 Capiananya naik menjadi 220 , pengukuran diperoleh dari data Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Pengukuran Tahun 2024 dengan menunjukan kinerja yang **sangat tinggi** pada Tahun 2024.
4. Capaian kinerja Kepatuhan terhadap norma norma Ketenagakerjaan di Provinsi Jambi sebagaimana tabel 3.8 tersebut diatas, pada Tahun 2022 sebesar 116,3, Tahun 2023 sebesar 126,8 % dan Tahun 2024 capaiannya sebesar 126 % dengan menunjukan kinerja yang **sangat tinggi** pada Tahun 2024. dengan jumlah Perusahaan yang telah menerapkan Norma Ketenagakerjaan sebanyak 15.544 Perusahaan di Kabupaten/Kota se Provinsi jambi dari Jumlah Perusahaan yang terdaftar dalam Wajib Lapor Perusahaan sebanyak 15.755 Perusahaan.



5. Capaian kinerja Peningkatan Kelembagaan Ketenagakerjaan sebagaimana tabel 3.8 tersebut diatas, merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 129,1 %, dan capaian tahun 2023 sebesar 155,9 % dan pada Tahun 2024 capaiannya naik menjadi 160 % dengan menunjukkan kinerja yang **sangat tinggi** . dengan jumlah Perusahaan yang telah terbentuk bipartit sebanyak 170 Perusahaan dari 1.078 Perusahaan yang memenuhi Kriteria.
6. Capaian kinerja Jumlah Kawasan Transmigrasi yang berkualitas sebagaimana tabel 3.8 tersebut diatas, merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hasil Fasiltasi dan Koordinasi Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi pada tahun 2022,Tahun 2023 dan Tahun 2024 masih terdapat 1 Lokasi Calon Penempatan Transmigran, yang berada di Desa Sungai Aur, Kecamatan Kumpeh Iir Kabupaten Muaro Jambi.
- 7 Capaian kinerja Nilai rata – rata indeks Perkembangan Transmigrasi yang direvitalisasi dalam program prioritas nasional sebagaimana tabel 3.8 tersebut diatas, merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada tahun 2022 capaiannya sebesar 142,19 %, dan pada Tahun 2023 capaiannya sebesar 129, % dan pada tahun 2024 Capaiannya naik menjadi sebesar 147 %.
8. Capaian kinerja Nilai rata – rata indeks Perkembangan Transmigrasi yang direvitalisasi dalam Program Prioritas Kementerian sebagaimana tabel 3.8 tersebut diatas, pada tahun 2022 capaiannya sebesar 1342,56 %, dan pada Tahun 2023 capaian sebesar 126,7 % dan pada Tahun 2024 Capaiannya naik menjadi 133 %.
9. Capaian Persentase Pemukiman dan kawasan serta masyarakat Transmigrasi yang sejahtera, Penyelesaian Permasalahan Lahan Transmigran pada tahun tahun 2022 Capainya sebesar 222 %,dan pada Tahun 2023 188 % dan pada Tahun 2024 naik capaiannya sebesar 185 % dengan jumlah bidang lahan yang sudah terselesai sertifikatnya sebanyak 6.900 bidang lahan, dari total jumlah lahan yang bermasalah sebanyak 13.457 bidang lahan.

10. Capaian kinerja Indikator Kinerja Jumlah areal yang dicadangkan untuk lokasi Transmigrasi yang clear dan clean sebagaimana tabel 3.8 tersebut diatas, Pada Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 masih terdapat 1 lokasi, Hasil Fasilitas dan koordinasi Disnakertrans Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten, Potensi sebagai calon lokasi Transmigrasi baru, yang berada di Sungai Nibung, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun.
11. Capaian kinerja Nilai IKM Untuk Kepuasan Masyarakat sebagaimana tabel 3.8 tersebut diatas, Pada Tahun 2022 Capaiannya 93,2 %, pada Tahun 2023 naik capaiannya sebesar 97,19 % dan Pada Tahun 2024 Capaiannya naik menjadi 101 %, dengan Kategori “ B”.
12. Capaian kinerja Peningkatan Nilai SAKIP tersebut diatas, Pada Tahun 2022 Capaiannya 94,1 %, pada Tahun 2023 naik capaiannya sebesar 96,92 % dan Pada Tahun 2024 Capaiannya naik menjadi 101 %, dengan Kategori / Predikat “ BB”.

3.1.4 Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target jangka menengah dalam dokumen Renstra 2021 - 2026 .

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja dengan target dalam Renstra

1	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2024	Target Kinerja 2024 pada Renstra	Capaian Kinerja atas target renstra 2021-2026	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya peluang kesempatan sektor formal dalam dan luar negeri	Persentase tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	30,30	34,9	115	Tercapai
2	Meningkatnya kualitas SDM tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih dan bersertifikasi	5,30	5,44 %	103	tercapai



		kompetensi				
		Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	2,5	5,51	220	Tercapai
3	Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan kepatuhan terhadap norma Ketenagakerjaan	78	98,60	126	tercapai
		Persentase Peningkatan Kelembagaan Ketenagakerjaan	9,80	15,76	160	Tercapai
4	Meningkatkan cakupan kawasan yang layak huni.	Jumlah Kawasan Pemukiman Transmigrasi yang berkualitas	1 Lok	1 Lok	100 %	tercapai
		Nilai rata – rata indeks perkembangan Transmigrasi yang direvitalisasi dalam program prioritas nasional	35,64 Indeks	52,56 Indeks	147	tercapai
		Nilai rata – rata indeks perkembangan Transmigrasi yang direvitalisasi dalam program Prioritas Kementrian	41,8 Indeks	55,06 Indeks	133	tercapai
		Persentase Penyelesaian Permasalahan Lahan Transmigrasi	27,61	51,27	185	Tercapai
		Jumlah Areal yang dicadangkan untuk areal Transmigrasi yang Clear dan Clean	1 Lok	1 Lok	100 %	Tercapai
5	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Nilai IKM	84,01	84,91	101 %	Tercapai
6.	Meningkatkan Kualitas Implementasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	70,01	70,60	101 %	Tercapai

Berdasarkan table diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja Tenaga Kerja terdaftar yang ditempatkan di Provinsi Jambi sebagaimana tabel 3.9 Pada tahun 2024 115 , dengan Jumlah tenaga kerja

yang ditempatkan sebanyak 2.027 dan tenaga kerja yang mendaftar sebanyak 5.802 dari tenaga Kerja yang terdaftar di Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi.

2. Capaian kinerja Tenaga Kerja yang dilatih dan bersertifikasi di Provinsi Jambi sebagaimana tabel 3.9 tersebut, pada tahun 2024 sebesar 103 % dengan jumlah tenaga kerja yang dilatih sebanyak 2.340 orang yang berasal dari Pelathan Live Skill bagi Santri dan Santriawan, Dana APBN dan beberapa kegiatan pelatihan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Capaian kinerja Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana tabel 3.9 tersebut diatas, Pada Tahun merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan Target sebesar 2,5 % dengan realisasi sebesar 5,51 % atau Capaian 220 % dengan menunjukan kinerja yang **sangat tinggi** pada Tahun 2023.
4. Capaian kinerja Kepatuhan terhadap norma norma Ketenagakerjaan di Provinsi Jambi sebagaimana tabel 3.9 tersebut diatas, pada Tahun 2024 capaiannya sebesar 126 % dengan menunjukan kinerja yang **sangat tinggi** pada Tahun 2024. dengan jumlah Perusahaan yang telah menerapkan Norma Ketenagakerjaan sebanyak 15.544 Perusahaan di Kabupaten/Kota se Provinsi jambi dari Jumlah Perusahaan yang terdaftar dalam Wajib Laport Perusahaan sebanyak 15.775 Perusahaan.
5. Capaian kinerja Peningkatan Kelembagaan Ketenagakerjaan sebagaimana tabel 3.9 tersebut diatas, Pada Tahun tahun 2024 capaiannya sebesar 160 % dengan menunjukan kinerja yang **sangat tinggi** pada Tahun 2024. dengan jumlah Perusahaan yang telah terbentuk bipartit sebanyak 170 Perusahaan dari 1.078 Perusahaan yang memenuhi Kriteria.
6. Capaian kinerja Jumlah Kawasan Transmigrasi yang berkualitas sebagaimana tabel 3.9 tersebut diatas, Hasil Fasiltasi dan Koordinasi Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi pada tahun 2024 masih

- terdapat 1 Lokasi Calon Penempatan Transmigran, yang berada di Desa Sungai Aur, Kecamatan Kumpeh Iir Kabupaten Muaro Jambi.
7. Capaian kinerja Nilai rata – rata indeks Perkembangan Transmigrasi yang direvitalisasi dalam program prioritas nasional sebagaimana tabel 3.9 tersebut diatas, Pada Tahun 2024 dengan target indeks sebesar 35,64 indeks, realisasinya sebesar 52,56 Indeks atau capaian sebesar 147, %
 8. Capaian kinerja Nilai rata – rata indeks Perkembangan Transmigrasi yang direvitalisasi dalam Program Prioritas Kementerian sebagaimana tabel 3.9 tersebut diatas, tahun 2024 capaiannya sebesar 185 %, dan pada Tahun 2024 dengan target indeks sebesar 41,8 indeks, realisasinya sebesar 55,60 Indeks atau capaian sebesar 133 %
 9. Capaian Persentase Pemukiman dan kawasan serta masyarakat Transmigrasi yang sejahtera, Penyelesaian Permasalahan Lahan Transmigran pada tahun pada Tahun 2024 sebesar 51, 27 % atau capaiannya sebesar 185 % dengan jumlah bidang lahan yang sudah terselesaikan sertifikatnya sebanyak 6.900, dari total jumlah lahan yang bermasalah sebanyak 13.457 bidang lahan.
 10. Capaian kinerja Indikator Kinerja Jumlah areal yang dicadangkan untuk lokasi Transmigrasi yang clear dan clean sebagaimana tabel 3.9 tersebut diatas, Tahun 2024 masih terdapat 1 lokasi, Hasil Fasilitas dan koordinasi Disnakertrans Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten, Potensi sebagai calon lokasi Transmigrasi baru, yang berada di Sungai Nibung, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun.
 11. Capaian kinerja Nilai IKM Untuk Kepuasan Masyarakat sebagaimana tabel 3.9 tersebut diatas, Pada Tahun 2024 Capaiannya naik menjadi 101 %, dengan Kategori “ B”.
 12. Capaian kinerja Peningkatan Nilai SAKIP tersebut diatas, Pada Tahun 2024 Capaiannya juga naik menjadi 101 %, dengan Kategori / Predikat “ BB”.



3.1.5 Analisis atas Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya

Tabel 3.10 Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Efisiensi/Tidak Efisien
1	2	3	4	5
Meningkatnya peluang kesempatan sektor formal dalam dan luar negeri	Persentase tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	115 %	92,43 %	Efisien
Meningkatnya kualitas SDM tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih dan bersertifikasi kompetensi	103 %	87,94 %	Efisien
	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	220 %	96,55 %	Efisien
Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan kepatuhan terhadap norma norma Ketenagakerjaan	126 %	99,99	Efisien
	Persentase Peningkatan Kelembagaan Ketenagakerjaan	160 %	99,95	Efisien
Meningkatkan cakupan kawasan yang layak huni.	Jumlah Kawasan Pemukiman Transmigrasi yang berkualitas	100 %	57,38 %	Efisien
	Nilai rata – rata indeks perkembangan Transmigrasi yang direvitalisasi dalam program prioritas nasional	147 %	99,05 %	Efisien
	Nilai rata – rata indeks perkembangan Transmigrasi yang direvitalisasi dalam program prioritas Kementrian	133 %	99,81 %	Efisien
	Persentase Penyelesaian Permasalahan Lahan Transmigrasi	185 %	99,81 %	Efisien
	Jumlah Areal yang dicadangkan untuk areal Transmigrasi yang Clear dan Clean	100 %	93,23 %	Efisien



Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Nilai IKM	101	92,43 %	Efisien
Meningkatkan Kualitas Implementasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	101	99,71	Efisien

Berdasarkan table diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Atas sasaran strategis Meningkatnya peluang kesempatan sektor formal dalam dan luar negeri sumber daya yang digunakan **telah efisien** dikarenakan rata-rata capaian kinerja yang diperoleh **lebih besar** dibandingkan dengan persentase serapan anggaran yang digunakan.
2. Atas sasaran strategis Meningkatnya kualitas SDM tenaga kerja sumber daya yang digunakan **telah efisien** dikarenakan rata-rata capaian kinerja yang diperoleh **lebih besar** dibandingkan dengan persentase serapan anggaran yang digunakan.
3. Atas sasaran strategis Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja sumber daya yang digunakan **telah efisien** dikarenakan rata-rata capaian kinerja yang diperoleh **lebih besar** dibandingkan dengan persentase serapan anggaran yang digunakan.
4. Atas sasaran strategis Meningkatkan cakupan kawasan yang layak huni. sumber daya yang digunakan juga **efisien** dikarenakan rata-rata capaian kinerja yang diperoleh **lebih besar** dibandingkan dengan persentase serapan anggaran yang digunakan.
5. Atas sasaran strategis Meningkatkan kualitas pelayanan Publik. sumber daya yang digunakan **efisien** dikarenakan rata-rata capaian kinerja yang diperoleh **lebih besar** dibandingkan dengan persentase serapan anggaran yang digunakan.
6. Atas sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Implementasi Akuntabilitas Kinerja. sumber daya yang digunakan juga **efisien** dikarenakan rata-rata capaian kinerja yang diperoleh **lebih besar** dibandingkan dengan persentase serapan anggaran yang digunakan.



3.1.6 Analisis Program /Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 3.11 Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

1	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2023 (%)	Realisasi Kinerja 2023 (%)	Ket	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya peluang kesempatan sektor formal dalam dan luar negeri	Persentase tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	30,30	34,9	Tercapai	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
							Perlindungan PMI (pra dan Purna Penempatan)
2	Meningkatnya kualitas SDM tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih dan bersertifikasi kompetensi	5,30	5,44	Tercapai	Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
		Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	2,5	5,51	Tercapai		Pegukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
3	Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan kepatuhan terhadap norma norma Ketenagakerjaan	78	98,60	tercapai	Program Pengawasan Ketenaga Kerjaan	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
		Persentase Peningkatan Kelembagaan Ketenagakerjaan.	9,80	15,76	Tercapai	Program Hubungan Industri	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok



							Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat / berdampak kepentingan di 1(satu) Daerah Provinsi Jambi
4	Meningkatkan cakupan kawasan yang layak huni.	Jumlah Kawasan Pemukiman Transmigrasi yang berkualitas	1 Lokasi	1 Lokasi	Tercapai	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Pesebaran penduduk yang besal dari satu Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		Nilai rata – rata indeks perkembangan Transmigrasi yang direvitalisasi dalam Program Prioritas Nasional	35,64 Indeks	52,56 Indeks	Tercapai	Program Pengembangan Transmigrasi	Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahapan Pemantapan
		Nilai rata – rata indeks perkembangan Transmigrasi yang direvitalisasi dalam Program Prioritas Kementerian	41,8 Indeks	55,60 Indeks	Tercapai	Program Pengembangan Transmigrasi	Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahapan Pemantapan
		Persentase Penyelesaian Permasalahan Lahan Transmigrasi	27,61	51,27	Tercapai	Program Pengembangan Transmigrasi	Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahapan Pemantapan
		Jumlah Areal yang dicadangkan untuk areal Transmigrasi yang Clear dan Clean	1 Lokasi	1 Lokasi	Tercapai	Program Perencanaan Transmigrasi	Pecadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
5	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Nilai IKM	84,01	84,91	Tercapai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Adm Umum Perangkat Daerah
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
							Pemeliharaan Barang milik



							daerah Penunjang urusan Pemerintahan
							ADM Keuangan perangkat Daerah
6	Meningkatkan Kualitas Implementasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	70,01	70,60	Tercapai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan , Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Program Urusan Ketenagakerjaan seperti Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Pelatihan kerja, Program Pengawasan Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial merupakan Program yang capaian kinerja baik, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.11 diatas.
2. Program Urusan Transmigrasi : Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Program Pengembangan Transmigrasi dan Program Perencanaan Transmigrasi juga pencapaian Kinerja baik tahun 2024.

Dari beberapa kesimpulan diatas tersebut, perlu langkah - langkah yang konkrit untuk meningkatkan target - target Program yang dilakukan yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Latihan Kerja, dengan cara :
 1. Peningkatkan pelayanan pelatihan bagi pencari kerja di Balai Latihan Kerja berbasis Kompetensi.
 - 2) Peningkatan Pelayanan Pelatihan berbasis masyarakat melalui Mobile Training Unit (MTU) ke Kabupaten/Kota.
 - 3) Pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga instruktur pada Balai Latihan Kerja.
 - 4) Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan Balai Latihan Kerja dalam rangka menunjang pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
 - 5) Meningkatkan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)

2. Urusan Ketramigrasian :

- 1) Mengembangkan wilayah transmigrasi berbasis masyarakat desa, dengan cara meningkatkan penyediaan lahan bagi penempatan transmigrasi.
- 2) Mendorong peningkatan usaha produktif bagi warga binaan transmigrasi, dengan cara :
Meningkatkan pemanfaatan lahan usaha yang ada dengan penguatan kepemilikan Lahan Transmigran.

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024

3.2.1. Program dan Kegiatan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi selama tahun 2024 melalui dana Murni APBD Provinsi Jambi mendapatkan anggaran untuk melaksanakan urusan bidang ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebesar 28.386.130.221,-, dan setelah dilakukan Perubahan APBD 2024 menjadi Rp. 26.563.912.668,- dengan realisasi Rp. 25.321.536.024,- (95,32%) keuangan dan dengan realisasi fisik 97,21%, untuk mendanai 9 program yaitu:

- 1) Program Penujang Urususan Pemerintahan Daerah Provinsi
- 2) Program Perencanaan Tenaga Kerja
- 3) program Pelatihan Tenaga Kerja
- 4) program Penempatan Tenaga Kerja
- 5) Program Hubungan Industri
- 6) program Pengawasan Ketenagakerjaan
- 7) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
- 8) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- 9) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

3.3. 2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi

Tugas dari program ini adalah membantu dinas dalam rangka mengkoordinasikan dan mengedalikan tugas tugas bidang dan pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, pengelolaan urusan umum, kepegawaian , keuangan, dan aset Dinas. Besarnya anggaran yang tersedia untuk program penunjang Urusan Pemerintah Provinsi adalah sebesar Rp.20.721.122.516,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.1154.063.963,- (92,43 %) dengan realisasi fisik sebesar (100%). Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 7 (tujuh) kegiatan yaitu:

Kegiatan

- 1) Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan dana sebesar

Kegiatan dengan dana sebesar 104.631.600,- dengan realisasi Rp. 104.331.600 (99,71%) dengan realisasi fisik sebesar (100%)

- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan dana sebesar Rp.18.539.349.087,- dengan realisasi 18.088.399.226,- (97,57%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

dengan dana sebesar Rp. 120.555.900,- dengan realisasi 120.473.597,- (99,93%) dengan realisasi fisik sebesar 100 %.

- 4) Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

dengan dana sebesar Rp.740.315.000,- dengan realisasi Rp. 708.301.237,- (95,68%) dengan realisasi fisik sebesar (100%)

- 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Ururusan Pemerintah Daerah

dengan dana sebesar Rp.262.109.600,- dengan realisasi Rp. 253.031.900,- (95,54%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja

tugas dari program ini adalah membantu dinas dalam rangka menyusun rencana tenaga makro meliputi adalah sebesar Rp.36.00.000,- dengan realisasi sebesar Rp.36.000.000,- (100%) dengan realisasi fisik sebesar 100% Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu:

Kegiatan

- 1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja dengan anggaran dana sebesar Rp. 36.00.000,- dengan realisasi Rp. .36.00.000,- dengan realisasi (100,%) fisik sebesar (100%)

3. Program Pelatihan Tenaga Kerja

Tugas dari program ini adalah membantu Dinas dalam rangka menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi pelatihan tenaga kerja.

Besarnya anggaran yang tersedia untuk Program Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas adalah sebesar Rp. 5.781.999.111,- dengan realisasi sebesar Rp.5.084.921.633,-(87,94%) dengan realisasi fisik sebesar (88,41%). Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu:

Kegiatan

- 1) Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi dengan dana sebesar Rp.5.719.325.511,dengan realisasi Rp.5.024.598.735,-(87,85%) dengan realisasi fisik sebesar (87,85%).

2) Pegukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi Jambi

dengan dana sebesar Rp.62.673.600,- dengan realisasi 60.322.898,- (96,25%) dengan realisasi fisik sebesar (98 %).

4. Program penempatan tenaga kerja

Tugas dari program ini adalah membantu Dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perluasan kesempatan kerja dan melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi penempatan tenaga kerja

Outcome (sasaran) dari program ini diharapkan menurunnya angka pengangguran dan meningkatnya peluang dan kesempatan kerja.

Besarnya anggaran yang tersedia untuk Program Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas adalah sebesar Rp. 294.952.370,- dengan realisasi sebesar Rp.284.782.153,- (96,55%) dengan realisasi fisik sebesar 97,20%. Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu:

Kegiatan

- 1) .Pelayanan antar kerja dengan dana sebesar Rp. 183.952.820 dengan realisasi Rp.173.849.209 (94.51%) dengan realisasi fisik sebesar (95.51%
- 2) Perluasan kesempatan kerja dengan dana sebesar Rp.110.999.550,- dengan realisasi Rp. 110.932.944,- (99,94%) dengan realisasi fisik sebesar (100 %)

5. Program Hubungan Industrial

Outcome dari program ini adalah membantu Dinas dalam rangka menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial d
rangkamelaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis .

Besarnya anggaran yang tersedia untuk Program Hubungan Industri adalah sebesar Rp150.942.000,- dengan realisasi sebesar Rp.150.564.000,- (99,74%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu:

Kegiatan

- 1) Pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat / berdampak kepentingan di 1(satu) Daerah Provinsi Jambi dengan dana sebesar Rp. 39.722.000,- dengan realisasi Rp.39.704.000,- (99,95%) dengan realisasi fisik sebesar (99,95%).
- 2) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota dengan dana sebesar 111.218.200,- dengan realisasi Rp. 110.860.000,- (99,68%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

6. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Outcome dari program ini adalah membantu Dinas dalam rangka menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial dan melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dan keamanan, kesehatan dan keselamatan.

Besarnya anggaran yang tersedia untuk Program Pengawasan ketenagakerjaan adalah sebesar Rp.296.060.00,- dengan realisasi sebesar Rp.291.131.911,- (98,34 %) dengan realisasi fisik sebesar (98,78%) Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu:

Kegiatan

1. Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan

dengan dana sebesar Rp.296.060.00,- dengan realisasi sebesar Rp.291.131.911,- (98,34 %) keuangan dan dengan realisasi fisik sebesar (98,78%) , -

7. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Tugas dari program ini adalah membantu Dinas dalam rangka menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman dan pengembangan kawasan transmigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besarnya anggaran yang tersedia untuk Program pengembangan wilayah transmigrasi adalah sebesar Rp.25.000.000,-dengan realisasi sebesar Rp.23.307.295,- (93,23 %) dengan realisasi fisik sebesar 95.25%. Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu:

Kegiatan

1. Pecadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi

dengan dana sebesar Rp. .25.000.000,- dengan realisasi Rp. 23.307.295,- (93,23%) dengan realisasi fisik sebesar (95,25%)

8. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Tugas dari program ini adalah membantu Dinas dalam rangka menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman dan pengembangan kawasan transmigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besarnya anggaran yang tersedia untuk Program pengembangan wilayah transmigrasi adalah sebesar Rp80.095.500,-dengan realisasi sebesar Rp.45.956.972 (57,38 %) dengan realisasi fisik

sebesar 60,35%. Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu:

Kegiatan

1. Penataan Pesebaran penduduk yang besar dari satu Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
dengan dana sebesar Rp. Rp80.095.500,- dengan realisasi Rp. 45.956.972,- (57,38 %) dengan realisasi fisik sebesar (60,35%)

9. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Tugas dari program ini adalah membantu Dinas dalam rangka menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman dan pengembangan kawasan transmigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besarnya anggaran yang tersedia untuk Program pengembangan wilayah transmigrasi adalah sebesar Rp.131.904.500,-dengan realisasi sebesar Rp.130.334.500,- (98,81 %) dengan realisasi fisik sebesar 99,05%. Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu:

Kegiatan

1. Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahapan Pemantapan dengan dana sebesar Rp. 131.904.500,- dengan realisasi Rp. .130.334.500,- (98,81%) dengan realisasi fisik sebesar (99,05%)

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi merupakan wujud dari pertanggungjawaban yang berisikan informasi mengenai kinerja yang telah dilakukan oleh Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi pada Tahun 2024 atas pelaksanaan tugas dan fungsi dari organisasi dengan beserta pembiayaannya. Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi yang dikemukakan dalam laporan ini, telah mencoba menggambarkan kinerja yang telah dicapai berdasarkan Target IKU (Indikator Kinerja Utama) Tahun 2024, alokasi dana dari kegiatan yang ditetapkan. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab terdahulu dan analisa pencapaian kinerja, baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maupun pelaksanaan Program dan Kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi selama tahun 2024 melalui dana Murni APBD Provinsi Jambi mendapatkan anggaran untuk melaksanakan urusan bidang ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebesar 28.386.130.221,-, dan setelah dilakukan Perubahan APBD 2024 menjadi Rp. 26.563.912.668,- dengan realisasi Rp. 25.321.536.024,- (95,32%) keuangan dan dengan realisasi fisik 97,21%, untuk mendanai 9 program yaitu:
 - 1) Program Penujang Urususan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - 2) Program Perencanaan Tenaga Kerja
 - 3) program Pelatihan Tenaga Kerja
 - 4) program Penempatan Tenaga Kerja
 - 5) Program Hubungan Industri
 - 6) program Pengawasan Ketenagakerjaan
 - 7) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
 - 8) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
 - 9) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi



2. Secara umum hasil pencapaian tugas pokok dan fungsi sebagaimana sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi dan dijabarkan dari hasil perhitungan pencapaian kinerja (LKj) , dapat disimpulkan sebagai berikut :
 1. Program Urusan Ketenagakerjaan seperti Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Pelatihan kerja, Program Pengawasan Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial merupakan Program yang capaian kinerja baik.
 2. Program Urusan Transmigrasi : Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Program Pengembangan Transmigrasi dan Program Perencanaan Transmigrasi juga pencapaian Kinerja baik tahun 2024.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BAHARI, SH, MSi**

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.**

Jabatan : **Gubernur Jambi**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

GUBERNUR JAMBI,

Dr. H. AL HARIS, S. Sos, MH.

Jambi, Januari 2024

Pihak Pertama,

BAHARI, SH, MSi

Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19640417 199203 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Peluang kesempatan kerja sektor formal dalam dan luar Negeri	Persentase Tenaga Kerja Terdaftar yang ditempatkan	30,30 %
2.	Meningkatnya Kualitas SDM Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih dan bersertifikasi Kompetensi	5,30 %
		Persentase Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	2,5 %
3.	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Kepatuhan Norma – Norma Ketenagakerjaan	78 %
		Persentase Peningkatan Kelembagaan Ketenagakerjaan	9,8 %
4	Meningkatnya Cakupan Kawasan yang layak huni	Jumlah kawasan pemukiman transmigrasi yang berkualitas	1 Lokasi
		Nilai rata-rata inndeck Perkembangan Transmigrasi yang di revitalisasi dalam program prioritas nasional	35,64 Indeks
		Nilai rata-rata inndeck Perkembangan Transmigrasi yang di revitalisasi dalam program prioritas Kementerian	41,8 l indeks
		Persentase Pemukiman dan kawasan serta masyarakat Transmigrasi yang sejahtera	27,61 %
		Jumlah areal yang dicadangkan untuk lokasi Transmigrasi yang Clear dan Clean	1 Lokasi
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai IKM untuk Kepuasan Masyarakat	84,50
		Jumlah Nilai SAKIP	70,01

Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja
4. Program Penempatan Tenaga Kerja
5. Program Hubungan Industrial
6. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
7. Program Perencanaan Kawasan Traransmigrasi
8. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
9. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

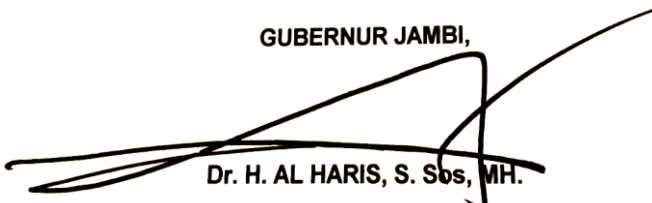
Jumlah

Anggaran

Rp. 20.875.177.859,-
Rp. 36.000.000,-
Rp. 6.826.952.362,-
Rp. 294.952.650,-
Rp. 150.940.000,-
Rp. 447.000.000,-
Rp. 25.000.000,-
Rp. 80.095.500,-
Rp. 131.904.500,-

Rp. 28.386.130.221

GUBERNUR JAMBI,


Dr. H. AL HARIS, S. Sbs, MH.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi



BAHARI, SH, MSi

Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19640417 199203 1 010

Capaian Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja (IKU Eselon II) Tahun 2024
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Bidang Penanggung Jawab Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Tenaga Kerja Terdaftar yang ditempatkan	(Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan / Jumlah Tenaga Kerja yang terdaftar) x 100) (2.027/5.802 X 100)	Persen	30.30%	34.9%	Bidang P3TKP
2	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih dan bersertifikasi Kompetensi	(Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih kompetensi / Jumlah Pengguran terbuka (50 %) X100) (2.340/43.037 X100)	Persen	5.30%	5.44%	Bidang P3TKP / UPTD BLKP
3	Persentase Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Tahun - N (Data IPK Pengukuran Tahun 2024)	Persen	2,5 %	5.51%	Bidang P3TKP
4	Persentase Peningkatan Kepatuhan Norma-Norma Ketenagakerjaan	(Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma K3 / Jumlah perusahaan yang terdaftar) x 100 (15.544/15.775)X100	Persen	78%	98.60%	Pengawasan dan HI
5	Persentase Peningkatan Kelembagaan Ketenagakerjaan	(Jumlah Perusahaan yang telah terbentuk bipartit / Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria) x 100) (170/1.078)X100	Persen	9.80%	15.76%	Pengawasan dan HI
6	Jumlah kawasan pemukiman transmigrasi yang berkualitas	Jumlah Ketersediaan Lokasi Pemukiman Tahun - N (Desa Sungai Aur, Kumpeh Ilir, Ma jambi)	Lokasi	1 Lokasi	1 lokasi	Transmigrasi
7	Nilai rata-rata indeks Perkembangan Transmigrasi yang di revitalisasi dalam program proiritas nasional	Nilai rata-rata indeks Perkembangan Transmigrasi yang di revitalisasi dalam program proiritas nasional	Indeks	35,64 Indeks	52,56 Indeks	Transmigrasi
8	Nilai rata-rata indeks Perkembangan Transmigrasi yang di revitalisasi dalam program proiritas Kementrian	Nilai rata-rata indeks Perkembangan Transmigrasi yang di revitalisasi dalam program proiritas nasional	Indeks	41,8 Indeks	55,60 Indeks	Transmigrasi
9	Persentase Pemukiman dan kawasan serta masyarakat Transmigrasi yang sejahtera	(Jumlah Lahan terselesaikan / Jumlah Lahan yang bermasalah (13.457) x 100) (6.900/13.457x100)	Persen	27.61%	51.27%	Transmigrasi
10	Jumlah areal yang dicadangkan untuk lokasi Transmigrasi yang Clear dan Clean	Jumlah Perencanaan Pencadangan Tanah Transmigrasi yang di fasilitasi (Desa Sei Nibung Kec, Singkut Kab. Sarolangun)	Lokasi	1 Lokasi	1 lokasi	Transmigrasi
11	Nilai IKM untuk Kepuasan Masyarakat	Jumlah Nilai IKM	Total Nilai	84,01	84.91	Sekretariat (TU dan Keuangan)
12	Jumlah Nilai SAKIP	Jumlah Nilai SAKIP	Total Nilai	70,01	70,60	Sekretariat (PEP)

Lampiran 2 : Penghargaan yang Diraih Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi Tahun 2024

No	NamaPenghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Biro Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (FotoPiagamdanPiala/FotoSaatPenerimaanPenghargaan)
1	2	3	4	5	6
1	Paritrana Award diterima Gubernur Jambi Al Haris karena berjasa mendukung penuh pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara JaminanSosial (BPJS) Ketenagakerjaan.	Menteri Ketenagakerjaan RI, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan	Gubernur Jambi (Disnakertrans Prov Jambi)	Jakarta, 12 Sepetember 2024	